



Judul : Jokowi Ngebut Lagi
Tanggal : Sabtu, 25 September 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 1-8

Bangun Ibu Kota Negara Di Kaltim Jokowi Ngebut Lagi

Setelah "direm" karena pandemi Corona, proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim) "digas" lagi. Bahkan, Presiden Jokowi terlihat mulai ngebut.

APA buktinya? Salah satunya, Jokowi telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022. Perpres tersebut telah ditetapkan, Kamis (9/9). Dalam Perpres itu, Jokowi menetapkan

proyek IKN di Kaltim sebagai salah satu proyek prioritas strategis.

Tujuannya, mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan.

Dalam Perpres itu juga dirinci soal alo-

kasi anggaran sebesar Rp 9,633 triliun untuk 8 proyek. Nah, anggaran proyek IKN dalam Perpres itu tertuang dalam poin ketiga, yaitu sebesar Rp 510,79 miliar.

Lengkapannya, kedelapan proyek tersebut adalah: pertama, pembangunan wilayah

Batam-Bintan Rp 453,9 miliar. Kedua, pengembangan Wilayah Metropolitan (WM): Palembang, Denpasar, Banjarmasin, Makassar Rp 2,9 triliun.

◆ BERSAMBUNG KE HAL 8

Tahun Depan Anggaran IKN Rp 510,79 M

Jokowi Ngebut Lagi
... DARI HALAMAN 1

Ketiga, pembangunan IKN Rp 510,79 miliar. Keempat, pembangunan kota baru: Maja, Tanjung Selor, Sofifi, dan Sorong Rp 1,028 triliun.

Kelima, wilayah adat Papua: Wilayah Adat Laa Pago dan Wilayah Adat Domberay Rp 1,58 triliun. Keenam, pemulihan pascabencana: Kota Palu dan sekitarnya, Pulau Lombok dan Sekitarnya, serta kawasan pesisir Selat Sunda Rp 1,9 triliun.

Ketujuh, PKSN kawasan perbatasan negara Rp 634,98 miliar. Dan kedelapan, manajemen aset lahan dalam pemberdayaan masyarakat (Reforma Agraria) Rp 566,7 miliar.

Proyek IKN memang sempat redup karena pandemi Covid-19. Fokus pemerintah dialihkan untuk menangani penyebaran virus asal China itu.

Proyek IKN kembali ramai dibicarakan pasca pertemuan ketua umum parpol koalisi dan Partai Amanat Nasional (PAN) dengan Presiden Jokowi

di Istana, Rabu (25/8). Dalam pertemuan itu, Jokowi bersama para Ketua Umum Parpol memastikan, rencana pemindahan IKN tetap berjalan meski di tengah situasi pandemi Corona.

Pasca pertemuan itu, pemerintah langsung tancap gas menggarap proyek IKN. Pemerintah pun berencana segera mengirimkan Surat Presiden soal Rancangan Undang-Undang IKN ke DPR.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, saat rapat dengan Komisi XI DPR, Kamis (2/9), mengatakan, persiapan pembangunan IKN mulai berjalan. Dimulai dari membuat skema pembangunan hingga sudah ada RUU IKN.

"Di dalam masterplan Bappenas, pembangunan diperkirakan 15-20 tahun," ujar Suharso.

Jokowi juga mengumpulkan para pengusaha untuk membahas pembangunan IKN di Istana Negara, Rabu (8/9). Dalam kesempatan itu, Jokowi menyampaikan rencana pemerintah yang akan jalan terus membangun IKN kepada para pengusaha.

Lalu, saat bertemu para pemimpin

redaksi di Istana Negara, Rabu, (15/9), Jokowi juga bicara soal proyek IKN. Sebuah video yang menggambarkan seperti apa IKN yang akan dibangun nanti, ditunjukkan Jokowi ke para pemimpin redaksi. Indah, mengesankan, memang, tapi Jokowi berpesan jangan dulu dibikin berita.

Bagaimana tanggapan DPR soal rencana pembangunan IKN yang akan disebut ini? Anggota Komisi XI DPR, Hendrawan Supratikno mengatakan, anggaran tersebut, *detailed engineering design* bisa dirampungkan. "Jadi anggaran tersebut berfungsi sebagai sinyal sekaligus pemantik komitmen," ujarnya.

Menurut dia, porsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap kebutuhan pendanaan IKN hanya sekitar 20 persen. Sisanya, melalui pendanaan variatif dan campuran yang diperoleh dari swasta, kerja sama pemerintah dan badan usaha, maupun lembaga investasi.

"Saya menduga, dalam waktu yang tidak terlalu lama, pemerintah akan menyerahkan RUU IKN ke DPR. Dengan payung hukum undang-undang, alokasi

anggaran di tahun-tahun mendatang akan lebih besar," tutur Hendrawan.

Ekonom Indef, Sugiyono Madelan Ibrahim menyarankan, pemerintah tetap fokus pada kesehatan masyarakat. Setelah itu, selesaikan dulu persoalan transformasi utang yang sangat besar atas besarnya defisit anggaran waktu periode pandemi, maupun saat gencar membangun infrastruktur berbasis utang.

Apalagi, kata dia, berdasarkan kajian Indef, pembangunan IKN tidak berdampak besar terhadap pemerataan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia berasal dari konsumsi rumah tangga dan ekspor. Kemudian dari industrialisasi, perdagangan dan ritel, serta dari sektor pertanian.

Hal senada dikatakan Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio. Menurut dia, pemerintah masih harus memprioritaskan kesehatan dan ekonomi di tahun depan. "Pindah bagus karena Jakarta sudah nggak muat. Tapi, direncanakan dulu. Negara lain juga begitu kok. Jangan sampai bikin tumpukan utang di generasi yang akan datang," tukasnya. ■ MEN